

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Perangkat Desa, dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ana Mar'atul Mufidah^{1*}, Arista Fauzi Kartika Sari², Irma Hidayati³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: mufidahmaratul3@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis metode dalam penelitian ini kuantitatif dengan teknik pengambilan data *purposive sampling* dalam memilih sampel, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26, sehingga jumlah sampel yang diperoleh 85 responden. Data yang didapatkan dari kuesioner yang disebar langsung dengan bentuk *hard file*. Sumber data diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kasi Kesra di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, kompetensi perangkat desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and discuss the influence of information technology utilization, village officials' understanding, and village officials' competence on accountability in village fund management. This study employed a quantitative method with purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression using SPSS version 26, resulting in a sample size of 85 respondents. Data were collected from questionnaires distributed directly in hard copy. Data sources were obtained from the Village Head, Village Secretary, Finance Officer, Planning Officer, and Head of Social Welfare in Sangkapura District, Gresik Regency. The results indicate that information technology utilization has a positive and significant effect on accountability in village fund management. Village officials' understanding has a positive and significant effect on accountability in village fund management. Village officials' competence has a positive and significant effect on accountability in village fund management. Simultaneously, information technology utilization, village officials' understanding, and village officials' competence have a significant effect on accountability in village fund management.

Keywords: Information technology utilization, village officials' understanding, village officials' competence, accountability in village fund management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntabilitas di dalam lembaga pemerintah melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, serta target yang jelas pada setiap inisiatif kerja. Meskipun demikian, kondisi akuntabilitas di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Aksesibilitas layanan publik yang terbatas, mekanisme birokrasi yang rumit, dan defisiensi transparansi menjadi beberapa

indikator yang menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas di berbagai institusi pemerintah. Masyarakat sering kali menyampaikan keluhan terkait minimnya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui interaksi langsung maupun saluran media, yang akhirnya mengakibatkan penurunan reputasi pemerintah di kalangan publik (Rumada et al., 2025).

Pengelolaan Keuangan Desa mencakup semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 611, 2018 Pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan anggaran. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, Pemerintah Desa diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, dengan salah satu pedoman utamanya adalah akuntabilitas.

Dana Desa muncul sebagai salah satu langkah dukungan dari pemerintah pusat terhadap Desa dalam hal pembangunan. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa dijelaskan sebagai dana yang ditujukan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, proyek pembangunan, mendukung kegiatan masyarakat, dan memberdayakan warga yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Banyak aparat desa tersandung persoalan hukum akibat kesalahan dalam mengelola dana desa, sehingga Kejaksaan Negeri Gresik akan mengawal dan membina pengelolaan dana desa serta penanganan perkara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Desa se Kabupaten Gresik. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dengan tujuan agar kepala desa dan pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran desa mendapat pendampingan hukum, sehingga pengelolaan anggaran tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi (Habib, 2023).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, dan Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor. Sosialisasi tersebut diharapkan memberi pemahaman kepada pemerintah desa sebagai upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Gresik menyimpan banyak potensi yang perlu dikembangkan. Salah satu cara itu dilakukan Pemkab dengan membangun Gresik melalui pemanfaatan dan pengoptimalan pengelolaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pun disebut memiliki dampak pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gresik pada tahun 2025. Pemkab menargetkan seluruh desa di Gresik dapat menyandang status desa mandiri di tahun 2026. Tahun 2025 status desa mandiri berhasil mencapai 88 persen atau 290 dari 330 desa, dan ditargetkan meningkat menjadi 100 persen di tahun 2026 (Jatim, 2025).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan peningkatan kapabilitas aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dapat berfungsi sebagai solusi untuk memastikan bahwa Dana Desa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Watampone, 2025).

Pemahaman yang dimiliki oleh pengelola dana desa adalah syarat utama agar akuntabilitas desa dapat berjalan dengan optimal. Pemahaman menjadi sangat penting untuk dibahas karena merupakan faktor internal dan sangat penting. Di tingkat pemerintahan desa, Pemahaman di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar (Asro et al., 2023).

Kompetensi dapat dipahami sebagai kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Dengan memiliki kompetensi yang tinggi, maka kinerja yang dihasilkan akan maksimal. Pemahaman mengenai kompetensi menjadi sangat menarik, terutama dalam konteks kompetensi ini disebabkan oleh tingkat pendidikan perangkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan pendekatan yang berlandaskan pada asumsi filosofis mengenai sifat manusia. Manusia hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab dalam tindakan, berintegritas, dan jujur (Yuda *et al.*, 2020). Dalam pengertian yang lebih sederhana, teori *stewardship* mengungkapkan bahwa manajer, ketika diberi kebebasan, akan bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya yang mereka miliki, serta menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi (*Accounting Program BINUS University*, 2021). Menurut Sudaryo *et al.* (2021: 55) *Stewardship theory* adalah teori yang menjelaskan kondisi di mana eksekutif berperan sebagai pengelola dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik atau principal. Dalam teori ini, seorang pengelola akan bertindak demi kebaikan bersama. Ketika pengelola memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan principal, maka pengelola akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dan menghindari konflik dengan kepentingan principal.

Definisi Operasional Variabel

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₁)

Teknologi informasi adalah istilah yang mengacu pada penggunaan komputer, program aplikasi, jaringan, dan infrastruktur telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, mengirim, dan mengatur data serta informasi (*University*, 2025). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengawasan dan pengendalian dana tersebut. Program atau perangkat lunak yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan desa dapat mempermudah perangkat desa dalam memantau dan mengawasi pemakaian dana desa serta menilai kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan desa secara langsung. Secara umum, prinsip akuntabilitas di setiap desa masih belum berjalan dengan maksimal (Octavia *et al.*, 2023). Indikator yang dipakai merujuk pada Wardana., (2022):

1. Kemampuan teknologi dalam mempermudah pengolahan data
2. Kemampuan sistem dalam menyimpan dan mengamankan data
3. Integrasi data antara pemerintah desa dan pemerintah pusat/daerah
4. Kemudahan penggunaan perangkat TI oleh aparatur desa
5. Kemampuan teknologi dalam mempercepat pelaporan dan penyajian informasi
6. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi

Pemahaman Perangkat Desa (X₂)

Pemahaman perangkat desa mengenai pelaporan keuangan sangat penting untuk akuntabilitas keuangan desa. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengungkapkan bahwa desa merupakan suatu entitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengatur aspek pemerintahan serta kepentingan warga, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang terdapat dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa dapat berjalan secara optimal. Pemahaman menjadi elemen penting yang perlu dibahas karena merupakan faktor yang berada dalam internal. Di tingkat pemerintahan desa, pemahaman tergolong masih sangat lemah, terutama dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya terbilang cukup besar (Asro *et al.*, 2023). Indikator yang dipakai merujuk pada Masriyah *et al.*, (2023):

1. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh perangkat desa
2. Pelatihan teknis yang telah diikuti oleh aparat desa
3. Penguasaan mendalam aparat desa mengenai tanggung jawab atau pekerjaannya

Kompetensi Perangkat Desa (X₃)

Kompetensi adalah salah satu faktor penting dalam sistem merit yang menjadi dasar untuk pengelolaan manajemen pegawai negeri, bersamaan dengan kualifikasi dan kinerja. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan agar seorang pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal (Saridewi, 2021). Seorang pegawai negeri sipil diharuskan untuk senantiasa meningkatkan keahlian yang dimilikinya. Ini sejalan dengan salah satu nilai inti ASN yang BerAKHLAK, yaitu berkompeten. Menjadi kompeten dalam konteks BerAKHLAK berarti terus belajar dan memperbaiki kemampuan diri (Amrullah, 2023). Indikator yang dipakai merujuk pada Pebriyanto & Sumadi., (2021):

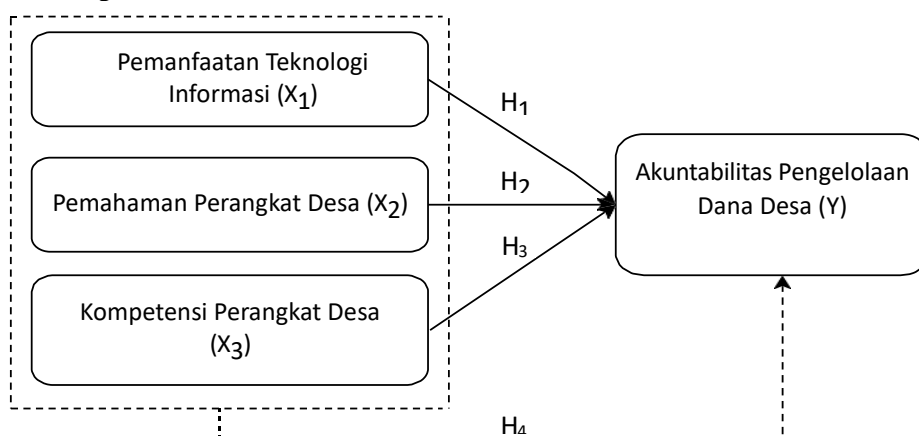
1. Keterampilan
2. Pengetahuan
3. Peran sosial
4. Citra Diri
5. Sikap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas dalam mengelola dana desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi. Kompetensi aparatur desa memiliki peranan penting dalam memahami bagaimana dana desa dikelola. Pengetahuan mereka mengenai pengelolaan dana desa akan mempengaruhi mutu laporan keuangan yang mereka buat, yang tentunya harus memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat. komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah desa serta mengurangi kesalahan dalam penyaluran laporan (Safelia, 2023). Indikator yang dipakai merujuk pada Masriyah, *et al.*, (2023):

1. Perencanaan rincian anggaran biaya
2. Pelaksanaan dalam anggaran biaya
3. Penatausahaan anggaran biaya
4. Pelaporan dokumentasi anggaran biaya kepada Bupati/Walikota
5. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes anggaran biaya

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

- > : Pengaruh Parsial
 - - - - -> : Pengaruh Simultan

Hipotesis Penelitian

H₁ : Pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: Pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dilaksanakan di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 sampai April 2026.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa Se-Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang berjumlah 253 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 responden. Populasi dengan metode *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* untuk memilih sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang telah ditentukan oleh peneliti, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi kesra.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Kajian ini memakai data primer yang diperoleh langsung melalui kuesioner *skala Likert* 1–5. Instrumen tersebut dibagikan secara langsung kepada perangkat desa di desa Se-Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang menjadi responden terpilih.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26 untuk melakukan analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	85	1	5	4.47	.853
X2	85	1	5	4.67	.762
X3	85	1	5	4.73	.643
Y	85	1	5	4.42	.730
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan analisis deskriptif, diketahui bahwa jumlah partisipan (N) dalam penelitian ini berjumlah 85 orang. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, variabel pemahaman perangkat desa menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, variabel kompetensi perangkat desa menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, dan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5. Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,42 dengan deviasi standar 0,730.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,47 dengan deviasi standar 0,853.
3. Pemahaman Perangkat Desa (X_2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,67 dengan deviasi standar 0,762.
4. Kompetensi Perangkat Desa (X_3) mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,73, dengan deviasi standar 0,643.

b. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X1.1	0,802	0,2133	Valid
	X1.2	0,857	0,2133	
	X1.3	0,833	0,2133	
	X1.4	0,785	0,2133	
	X1.5	0,768	0,2133	
	X1.6	0,776	0,2133	
Pemahaman Perangkat Desa	X2.1	0,805	0,2133	Valid
	X2.2	0,837	0,2133	
	X2.3	0,843	0,2133	
	X2.4	0,818	0,2133	
Kompetensi Perangkat Desa	X3.1	0,790	0,2133	Valid
	X3.2	0,839	0,2133	
	X3.3	0,875	0,2133	
	X3.4	0,838	0,2133	
	X3.5	0,777	0,2133	
	X3.6	0,776	0,2133	
	X3.7	0,840	0,2133	
	X3.8	0,851	0,2133	
	X3.9	0,853	0,2133	
	X3.10	0,796	0,2133	
	X3.11	0,748	0,2133	
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y.1	0,841	0,2133	Valid
	Y.2	0,858	0,2133	
	Y.3	0,861	0,2133	
	Y.4	0,868	0,2133	
	Y.5	0,685	0,2133	

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 2 jumlah responden yang digunakan untuk pengujian validitas adalah sebanyak 85 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2133.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,887	>0,60	Reliabel
2.	Pemahaman Perangkat Desa	0,844	>0,60	Reliabel
3.	Kompetensi Perangkat Desa	0,950	>0,60	Reliabel
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,846	>0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel yang lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan

c. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34224330
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.144
	Negative	-.104
Test Statistic		.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi secara normal.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	TOTAL_X1	.457	2.187
	TOTAL_X2	.336	2.976
	TOTAL_X3	.250	3.992

a. Dependent Variable: TOTAL_y

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 5 uji multikolinearitas, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.430	.913		1.566	.121
	TOTAL_X1	-.017	.044	-.062	-.384	.702
	TOTAL_X2	.125	.079	.297	1.582	.117
	TOTAL_X3	-.046	.032	-.313	-1.442	.153

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas, seluruh variabel memiliki nilai Sig. > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

e. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	1.319		.066	.948
	TOTAL_X1	.169	.064	.195	2.639	.010
	TOTAL_X2	.267	.114	.201	2.338	.022
	TOTAL_X3	.265	.047	.568	5.691	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_y

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.12 hasil dari uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.086 + 0.169X_1 + 0.267X_2 + 0.265X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 0,086 menunjukkan signifikansi sebesar 0,948 (> 0,05), yang berarti secara statistik konstanta tersebut tidak berbeda nyata dari nol. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki intersep yang bermakna. Kondisi ini dapat terjadi karena seluruh variabel independen memiliki rentang nilai yang jauh dari nol (skala Likert 1–5), sehingga estimasi intersep menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi difokuskan pada koefisien variabel independen yang seluruhnya signifikan, tanpa menarik kesimpulan substantif dari nilai konstanta. Koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X₁) sebesar 0,169 mengindikasikan bahwa peningkatan satu poin dalam pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,169, dengan asumsi variabel lainnya berada dalam kondisi konstan. Koefisien regresi pada variabel pemahaman perangkat desa (X₂) sebesar 0,267 bahwa peningkatan satu poin dalam pemahaman perangkat desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,267, dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya konstan. Koefisien regresi variabel kompetensi perangkat (X₃) sebesar 0,265 bahwa peningkatan satu poin dalam kompetensi perangkat desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,265, dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya konstan.

f. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	598.476	3	199.492	106.775	.000 ^b
	Residual	151.336	81	1.868		
	Total	749.812	84			

a. Dependent Variable: TOTAL_y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 106.775 dengan tingkat signifikansi sebesar .000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 ^a	.798	.791	1.367

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_y

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil pengujian diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,791. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 79,1%, sedangkan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini

3. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 10 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	1.319		.066	.948
	TOTAL_X1	.169	.064	.195	2.639	.010
	TOTAL_X2	.267	.114	.201	2.338	.022
	TOTAL_X3	.265	.047	.568	5.691	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_y

Sumber: Data diolah, 2026

1. Diketahui bahwa nilai sign variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) $0,010 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,639 > 1,988$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

2. Diketahui bahwa nilai sign variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,338 > 1,998$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh pemahaman perangkat desa (X_2) akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
3. Diketahui bahwa nilai sign variabel kompetensi perangkat desa (X_3) $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,691 > 1,998$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh kompetensi perangkat desa (X_3) akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Perangkat Desa, dan Kompetensi Perangkat Desa secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan melalui uji, yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 106.775 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi mendukung efisiensi, ketepatan, serta keandalan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. pemahaman perangkat desa yang tinggi terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa akan mendorong pelaksanaan tugas yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan kompetensi yang baik memungkinkan perangkat desa untuk menjalankan tugas secara profesional dan efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 106,775 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis (H1) dalam penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t pemanfaatan teknologi informasi memperoleh nilai t hitung sebesar 2.639 dengan tingkat signifikansi $0,010 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam kerangka teori *stewardship*, teknologi informasi berperan sebagai alat pendukung bagi perangkat desa dalam menjalankan amanah pengelolaan dana desa secara profesional dan bertanggung jawab. Sistem informasi keuangan desa memungkinkan pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel analisis regresi, variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,639 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis (H2) dalam penelitian ini diterima dan secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

3. Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t pemahaman perangkat desa memperoleh nilai t hitung sebesar 2,338 dengan tingkat signifikansi $0,022 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam perspektif teori *stewardship*, perangkat desa dipandang sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat untuk mengelola dana publik secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pemahaman perangkat desa mencerminkan kesiapan individu dalam menjalankan perannya sebagai pengelola amanah publik. Pemahaman yang baik terhadap regulasi, prosedur, dan mekanisme pengelolaan dana desa akan mendorong perangkat desa untuk bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel analisis regresi, variabel pemahaman perangkat desa (X_2) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,338 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis (H_3) dalam penelitian ini diterima dan secara parsial pemahaman perangkat desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

4. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t kompetensi perangkat desa memperoleh nilai t hitung sebesar 5,691 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam perspektif teori *stewardship*, kompetensi perangkat desa merupakan prinsip yang mencerminkan kemampuan individu dalam menjalankan amanah publik secara profesional dan bertanggung jawab. Kompetensi tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel analisis regresi, variabel kompetensi perangkat desa (X_3) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5,691 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dan hipotesis (H_4) dalam penelitian ini diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman perangkat desa, dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

1. Pengumpulan data secara langsung membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar, serta bergantung pada ketersediaan responden di lokasi.
2. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga responden bisa saja memberikan jawaban yang kurang teliti dalam mengisi data yang diperoleh.
3. Perangkat desa kemungkinan memberikan jawaban yang dianggap baik atau sesuai harapan peneliti, sehingga jawaban belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar metode pengumpulan data tidak hanya menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung, tetapi juga dikombinasikan dengan metode lain seperti kuesioner *online* atau wawancara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan responden, meningkatkan variasi jawaban, serta memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pendampingan saat pengisian kuesioner atau menambahkan metode wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan objektivitas jawaban responden dengan memberikan penjelasan bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga responden dapat menjawab dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrari. (2025). Jaringan Seluler Telkomsel dan Indihome di Bawean Gangguan, Ini Penyebabnya. Berita Gresik. <https://beritagresik.com/jaringan-seluler-telkomsel-dan-indihome-di-bawean-gangguan-ini-penyebabnya/>
- Adelia *et al.* (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(1), 156–167. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/258>
- Adnyana & Putra. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 3(3), 48–61. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2518>
- Akasah. (2021). Persoalan Sampah dan Sinyal HP di Bawean Jadi Atensi Bupati. Radar Gresik. <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83934465/persoalan-sampah-dan-sinyal-hp-di-bawean-jadi-atensi-bupati>
- Amrullah. (2023). Mau Menjadi ASN Kompeten? Temukan Gaya Pembelajaran Anda yang Sesuai. In BKD Kabupaten Cilacap. BKD Kabupaten Cilacap. <https://bkd.cilapkab.go.id/p/1009/mau-menjadi-asn-kompeten?-temukan-gaya-pembelajaran-anda-yang-sesuai>
- Andika *et al.* (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(4), 340–350. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2023>
- Asro *et al.* (2023). Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Ranto Baek. Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 276–284. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.574>

- Fajri et al. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Al-Istishad*, 17(2), 209–227.
- Febrianti *et al.* (2024). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa , Kepemimpinan Kepala Desa , Partisipasi Masyarakat , dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2, 256–263.
- Habib. (2023). Cegah Dana Desa Dikorupsi, Ini yang Dilakukan Kejaksaaan pada Desa se Kabupaten Gresik. [https://www.tvonenews.com/ daerah/jatim/ 121556-cegah-dana-desa-dikorupsi-ini-yang-dilakukan-kejaksaaan-pada-desa-se-kabupaten-gresik](https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/121556-cegah-dana-desa-dikorupsi-ini-yang-dilakukan-kejaksaaan-pada-desa-se-kabupaten-gresik)
- Indraswari & Rahayu. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- Jabar & Yuniarni. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Hukum*, 4(1), 131–146.
- Jatim. (2023). BPK dan DPR RI Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa di Sidoarjo. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. [https://jatim.bpk.go.id/ dari-media/bpk-dan-dpr-ri-sosialisasi-pendampingan-pengelolaan-dana-desa-di-sidoarjo/](https://jatim.bpk.go.id/dari-media/bpk-dan-dpr-ri-sosialisasi-pendampingan-pengelolaan-dana-desa-di-sidoarjo/)
- Jatim. (2025). Dorong Akuntabilitas Dana Desa, Pemkab Gresik Targetkan Desa Mandiri Seratus Persen di 2026. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim.Bpk.Go.Id).[https://jatim.bpk.go.id/dari-media/dorong-akuntabilitas- dana-desa-pemkab-gresik-targetkan-desa-mandiri-seratus-persen-di-2026](https://jatim.bpk.go.id/dari-media/dorong-akuntabilitas-dana-desa-pemkab-gresik-targetkan-desa-mandiri-seratus-persen-di-2026)
- Keputusan Bupati Gresik Nomor 140/4/HK/437.12/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Kabupa ten Gresik. <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/view/keputusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-140-4-hk437122023-tentang-besa-ran-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-gresik-tahun-anggaran-2023-1675648938>
- Keputusan Bupati Gresik Nomor 140/83/HK/437.12/2025 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Gresik. [https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/view/ kepu-tusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-140-83-hk-437-12-2025-tentang-besaran-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-gresik-tahun-anggaran-2025](https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/view/keputusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-140-83-hk-437-12-2025-tentang-besaran-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-gresik-tahun-anggaran-2025)
- Keputusan Bupati Gresik Nomor 410/14/HK/437.12/2024 tentang Besaran Dana Desa dan Status Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Gresik. <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/view/keputusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-410-14-hk-437-12-2024-tentang-besaran-dana-desa-dan-status-desa-di-kabupaten-gresik-tahun-anggaran-2024>
- Litualy & Putri. (2024). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Yang Berada Di Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 4(2), 86–97. [https://doi.org/ 10.30598/ kupna.v4.i2.p86-97](https://doi.org/10.30598/kupna.v4.i2.p86-97)
- Maharani & Galuh. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Mandasari *et al.* (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 35–43. [https://doi.org/ 10.31539/ costing. v7i5.11237](https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237)

- Mareta *et al.* (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>
- Masriyah *et al.* (2023). Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik). 32(3), 167–186.
- Melasari *et al.* (2024). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 101–110. <https://doi.org/10.32520/jak.v12i2.3052>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+ Lampiran .pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH%202018%20Lampiran.pdf)
- Ningsih. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 183–198. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2010>
- Nufus *et al.* (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa. 63–70.
- Nyuhtebel, T. R. D. (2024). Mengenal Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Desa Nyuhtebel*. [https://www.nyuhtebel.desa.id/news/mengenal-sistem-keuangan- desa-siskeudes](https://www.nyuhtebel.desa.id/news/mengenal-sistem-keuangan-desasiskeudes)
- Oktavia *et al.* (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akunatbilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. [https:// doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722](https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722)
- Pebriyanto *et al.* (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Kompetensi Aparatur Desa,Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 372–381. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2026>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/ permendagri-no-113-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/ permendagri-no-20-tahun-2018](https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2019). [https://peraturan. bpk.go.id/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/Details/102675/pp-no-11-tahun-2019)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. In Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. [https://peraturan. bpk.go.id/ Details/ 5729/pp-no-8-tahun-2016](https://peraturan.bpk.go.id/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016)
- Purba. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 10–19. [https://doi.org/10.30596/ jakk.v3i1.5699](https://doi.org/10.30596/jakk.v3i1.5699)
- Rahmadhani & Syahdan. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan. *Rosiding National Seminar on Accounting UKMC, Vol: 1 No 1, 1, 132–147*.
- Rahmadhani, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa Dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1).
- Safelia & Nela. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(1), 74–87. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Saren *et al.* (2022). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 13(1), 2022.
- Saridewi. (2021). Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural oleh Pegawai untuk Mengembangkan Kompetensinya. In Balai Diklat Keuangan Denpasar. BPPK Kementerian Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/artikel/pemanfaatan-hasil-penilaian-kompetensi-manajerial-dan-sosial-kultural-oleh-pegawai-untuk-mengembangkan-kompetensinya-258492>
- Situmorang. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.
- Sriwinarti, & Fadilla. (2025). Dimensi Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Universitas Bumigora , Indonesia apakah kebijakan pemerintah juga akan sepenuhnya berganti atau masih bisa dipertahankan , deteksi kecurangan y. 4, 24–37.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif 2023. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- University, T. (2025). Apa Itu Teknologi Informasi? Pengertian, Tujuan dan Fungsinya. BSE-PWT Telkom University. <https://bse-pwt.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-teknologi-informasi-pengertian-tujuan-dan-fungsinya/>
- Wardana & Yudha. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kerambitan. <https://repo.undiksha.ac.id/7442/>
- Wardana. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kera,Bira. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(03), 833–842.
- Watampone. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa: Meningkatkan Transparansi dan Efektivitas. DJPb Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3868-digitalisasi-pengelolaan-dana-desa-meningkatkan-transparansi-dan-efektivitas.html>
- Wulandari. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Demi Masyarakat yang Sejahtera. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim.Bpk.Go.Id). <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/akuntabilitas-pengelolaan-dana-desa-demi-masyarakat-yang-sejahtera/>